

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran berarti tindakan dan perilaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹³ Makna peran dapat didefinisikan dalam beberapa cara yang berbeda, antara lain: Pertama, peran menurut penjelasan histories berarti suatu karakter yang dimainkan oleh seorang aktor di panggung drama dalam lelakon tertentu. Kedua, peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dilakukan oleh seorang individu pada saat memegang jabatan tertentu agar individu tersebut dapat menjalankan fungsinya.

Peran adalah sekumpulan tindakan yang diharapkan dilakukan seseorang untuk memenuhi kedudukan sosial yang ditugaskan kepadanya secara formal atau informal. Peran ditentukan pada harapan dan kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk memenuhi harapan yang diinginkan tersebut.¹⁴ Peran merupakan aspek dinamis dari jabatan dimana seseorang dapat dikatakan telah memenuhi suatu peran jika mampu memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dan jabatannya.

¹³E.St. Harahap, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Balai Pustaka, 2007), 854.

¹⁴Masduki Duryat, dkk., *Mengasah Jiwa Kepemimpinan: Peran Organisasi Mahasiswa* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 12.

Kedudukan seseorang dalam masyarakat merupakan unsur tetap yang memperlihatkan tempatnya di depan umum, maka perlu dibedakan antara peran yang dimainkannya dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga seseorang dapat memenuhi perannya dan memegang posisi atau jabatan dalam masyarakat.

Ada tiga hal yang mencakup peran, yaitu:

- a. Peran meliputi aturan-aturan sosial yang berkaitan dengan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah teori tentang apa yang seseorang lakukan dalam masyarakat sebagai sebuah perkumpulan.
- c. Peran juga dapat dipandang sebagai tingkah laku individu yang berguna untuk tujuan membangun ketertiban umum atau keharmonisan dalam struktur sosial.¹⁵

2. Struktur Peran

Ada dua jenis struktur peran, yaitu:

- a. Peran formal (peran yang tampak jelas), yaitu peran yang memerlukan serangkaian tindakan yang konsisten. Peran formal dalam keluarga yaitu peran yang membangun kedudukan sosial suami/ayah dan istri/ibu, meliputi peran pencari nafkah, pengelola rumah tangga, memberikan perawatan, sosialisasi anak, rekreasi, persaudaraan (menjaga hubungan keluarga ayah dan ibu), seksual, dan peran terapeutik.

¹⁵Ibid,14.

b. Peran informal (peran tertutup), yaitu peran implisit (emosional) yang tidak terlihat di luar dan hanya ditunjukkan untuk memuaskan dorongan emosional individu dan memelihara keharmonisan keluarga. Peran informal dalam hal ini persyaratan posisi informal bervariasi dan ditentukan oleh ciri kepribadian anggota keluarga masing-masing. Peran formal dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan bantuan peran informal.¹⁶

3. Dimensi Peran

Berikut adalah beberapa dimensi peran, yaitu:

- a. Peran sebagai kebijakan. Paham ini menyatakan bahwa peran merupakan kebijakan yang efektif.
- b. Peran sebagai strategi. Menurut penganut paham ini, peran adalah metode untuk mendapatkan dukungan publik (*public support*) dengan keputusan dan keprihatinan masyarakat terdokumentasi dengan baik pada setiap tingkat keputusan untuk memastikan keputusan memiliki kepercayaan.
- c. Peran sebagai media komunikasi. Proses pengambilan keputusan dalam peran berfungsi sebagai media untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan masukan. Sudut pandang dan pilihan dari masyarakat dijadikan sebagai bahan masukan yang berguna agar keputusan responsif dan bertanggung jawab.

¹⁶Ibid, 13.

- d. Peran sebagai sarana penyelesaian sengketa. Peran dapat digunakan untuk mencoba mencapai kesepakatan tentang sudut pandang yang ada dan dengan demikian dapat mengurangi konflik. Peran dapat dijadikan sebagai pertukaran pikiran dan pandangan sehingga menimbulkan sikap toleransi, pengertian, mengurangi perasaan ketidakpercayaan dan bias.
- e. Peran sebagai terapi. Peran dilakukan untuk meringankan atau mengobati masalah psikologis sosial seperti ketidakberdayaan (rasa tidak berdaya), kurang percaya diri, dan persepsi bahwa mereka tidak penting di masyarakat.¹⁷

B. Objek Wisata

1. Pengertian Objek Wisata

Objek wisata merupakan kawasan yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk berkunjung baik kalangan muda maupun keluarga. Objek wisata adalah potensi yang mendorong hadirnya wisatawan.¹⁸ Objek wisata atau tempat wisata adalah tempat untuk rekreasi atau bersenang-senang. Objek wisata juga memainkan peran penting dalam industri pariwisata di mana pengunjung melakukan perjalanan. Objek wisata adalah kondisi atau lokasi alam yang telah dibangun dan dikembangkan, serta memiliki sumber daya wisata dan daya tarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Suatu objek wisata dikatakan baik dan menarik apabila memiliki keindahan alam, mempunyai

¹⁷Andi Kardian Riva'i, *Komunikasi Sosial Pembangunan "Tinjauan Komunikasi Dalam Pembangunan Sosial"* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2016), 14-15.

¹⁸Izza Mafruhah, dkk., *Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekologi dan Edukasi di Kawasan Waduk Kedung Ombo Sragen* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), 7.

keunikan, dan didukung dengan fasilitas yang dapat dinikmati oleh wisatawan.¹⁹

2. Penggolongan Objek Wisata

- a. Objek wisata dan daya tarik wisata alam. Biasanya menyajikan keindahan alam dan pemandangan secara langsung dan berada di luar ruangan.
- b. Objek wisata dan daya tarik budaya. Biasanya menyajikan peninggalan nenek moyang atau leluhur di mana karakteristik tiap daerah berbeda-beda berupa bangunan bersejarah, tarian, maupun museum.
- c. Objek wisata dan daya tarik minat khusus. Biasanya hanya menyajikan hal-hal yang diinginkan oleh wisatawan sebagai minat khusus dalam berkunjung, seperti memancing.²⁰

3. Kriteria-kriteria Penentuan Objek Wisata

- a. Ketersediaan sumber daya yang berpotensi menumbuhkan perasaan gembira, keindahan, kenyamanan, dan kebersihan.
- b. Tempat ini mudah diakses oleh pengunjung yang ingin berkunjung.
- c. Terdapat ciri khusus atau karakteristik yang unik.
- d. Terdapat infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk membantu wisatawan yang datang.
- e. Objek wisata alam yang indah memiliki daya tarik yang memikat bagi wisatawan.

12. ¹⁹Sigit Dwi Laksana, *Tumpuk Mempesona* (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020), 11-

²⁰Mafruhah, dkk., *Strategi Pengembangan Pariwisata*, 7-8.

- f. Objek wisata budaya dikatakan menarik karena memiliki nilai keunikan berupa pertunjukan seni, upacara adat, atau nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek yang diciptakan manusia pada masa dahulu.²¹

4. Landasan Hukum Kepariwisata

Pasal 1 ayat 4 UU RI No. 10 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Kepariwisata adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang mencerminkan kebutuhan setiap individu dan bangsa serta hubungan antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha. Pasal 2 UU RI No. 10 Tahun 2009 Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| a. Manfaat; | g. Partisipatif; |
| b. Kekeluargaan; | h. Berkelanjutan; |
| c. Adil dan merata; | i. Demokratis; |
| d. Keseimbangan; | j. Kesetaraan; dan |
| e. Kemandirian; | k. Kesatuan. |
| f. Kelestarian; | |

Fungsi kepariwisataan dijelaskan dalam Pasal 3 UU RI No. 10 Tahun 2009, Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

²¹Muharto, *Pariwisata Berkelanjutan: Kombinasi Strategi dan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 11.

Tujuan kepariwisataan dijelaskan dalam Pasal 4 UU RI No. 10 Tahun 2009, yaitu Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antarbangsa.²²

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “berdaya” yang berarti memiliki kekuatan dan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan, dalam bahasa Inggris menggunakan kata “*empowerment*” yang artinya pemberdayaan. Pemberdayaan berarti memberikan sesuatu kekuatan atau membuat sesuatu memiliki kekuatan.²³ Pemberdayaan merupakan upaya masyarakat dengan atau tanpa bantuan orang lain untuk meningkatkan taraf hidup mereka

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*.

²³Setyawan Adhi Nugroho, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Teknologi Tepat Guna di Daerah* (Bogor: Guepedia, 2021), 64.

dengan kekuatan sendiri melalui upaya optimalisasi kekuatan dan peningkatan kekuatan dalam negosiasi. Pemberdayaan harus mengutamakan kekuatan masyarakat daripada rekayasa eksternal yang sering kali mengorbankan kemandirian masyarakat lokal. Pemberdayaan adalah memberi warga kemampuan, peluang, pengetahuan, dan keterampilan untuk membantu memutuskan waktu yang akan datang serta berpartisipasi dalam memberi dampak pada kehidupan masyarakat.²⁴

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses pembangunan yang mendorong individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial guna memperbaiki kondisi dan keadaan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat dapat terjadi jika masyarakat ikut berpartisipasi. Pihak pelaksana pemberdayaan bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pihak aktif yang diberdayakan juga dapat mengubah kualitas hidup yang lebih tinggi dari sebelumnya.²⁵

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu upaya untuk mengangkat harkat dan martabat kelompok masyarakat dari keadaan lemah sehingga mampu membebaskan diri dari lingkaran keterbelakangan dan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup dan menjamin kesejahteraan hidup. Pemberdayaan diperlukan untuk meningkatkan

²⁴Ibid., 66.

²⁵Dedeh Maryani dan Ruth Roselin Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 8.

kesejahteraan masyarakat karena melalui pemberdayaan masyarakat dilatih berbagai jenis keterampilan agar kedepannya masyarakat dapat secara mandiri membuka suatu usaha atau lainnya. Tujuan tersebut bisa tercapai apabila program pemberdayaan pedesaan ditetapkan sehingga mampu menyejahterakan keluarga dan masyarakat.²⁶

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto, pemberdayaan masyarakat memiliki enam tujuan, yaitu:

a. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Lembaga yang baik dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Individu akan didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada dan memberikan kemudahan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati oleh semua anggota. Lembaga yang baik memiliki visi, misi, tujuan yang jelas, target yang terukur, dan program kerja yang terarah dan berperan dalam kemajuan lembaga. Kedua belah pihak dapat merasakan manfaat dan memotivasi karyawan untuk terus meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman mereka agar setiap anggota merasa berdaya.

b. Perbaikan usaha (*better business*)

Kegiatan perbaikan kelembagaan diharapkan dapat meningkatkan usaha yang dilakukan sehingga semua anggota merasa puas. Masyarakat sekitar dengan begitu dapat memperoleh manfaat secara nyata.

²⁶Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat "Wacana dan Praktik"* (Jakarta: Kencana, 2013), 24.

Peningkatan usaha diharapkan agar dapat dikembangkan sehingga semua kebutuhan dapat terpenuhi. Perbaikan usaha dalam hal ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup masyarakat.

c. Perbaikan pendapatan (*better income*)

Peningkatan usaha diharapkan dapat menambah pendapatan anggota. Perbaikan pendapatan yang dimaksud yaitu pendapatan keluarga dan masyarakat. Kegiatan penguatan keterampilan dalam bentuk pelatihan perlu dilakukan dengan berfokus pada bidang usaha masyarakat. Keluarga dan masyarakat dalam hal ini dapat merasakan kehidupan yang lebih layak.

d. Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Kemiskinan atau kurangnya pendapatan sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan. Perbaikan pendapatan dalam hal ini dapat memperbaiki lingkungan sosial dan fisik. Perbaikan lingkungan adalah sebagai bentuk sadar diri untuk memelihara dan melestarikan lingkungan. Perbaikan mutu lingkungan diharapkan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya.

e. Perbaikan kehidupan (*better living*)

Indikator taraf kehidupan masyarakat meliputi kualitas kesehatan, pendidikan, dan pendapatan keluarga atau daya beli. Kondisi kehidupan setiap keluarga dan masyarakat diharapkan meningkat sebagai hasil dari pendapatan dan lingkungan. Program pemberdayaan dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memperbaiki kehidupan setiap

keluarga dan masyarakat. Perbaikan kehidupan diharapkan dapat memperbaiki keadaan hidup setiap keluarga dan masyarakat.

f. Perbaikan masyarakat (*better community*)

Jika setiap keluarga memiliki kehidupan yang baik, maka kehidupan masyarakat yang lebih baik akan terwujud. Kehidupan kelompok masyarakat dengan begitu juga memiliki kehidupan yang lebih baik pula. Masyarakat dapat saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain. Kehidupan sosial pun akan tercipta dengan adanya kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat.²⁷

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam dalam bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengusahakan kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta perbaikan kehidupan yang lebih baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sejalan dengan ajaran Islam karena agama diturunkan untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Islam sangat menekankan agar setiap orang mampu melakukan pemberdayaan kepada setiap masyarakat yang berada pada kondisi ekonomi lemah. Pemberdayaan masyarakat dalam Islam sangatlah penting karena umat Islam dalam hal ini telah mempraktikkan nilai-nilai kepedulian sesuai ajarannya, dan melalui pemberdayaan masyarakat maka peradaban yang bermartabat secara ekonomi dapat terwujud.²⁸

²⁷Ibid., 9-10.

²⁸Achmad Saeful dan Sri Ramdhayanti, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam", *Syar'ie*, Vol. 3 (Februari 2020): 14-15.

3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin keberhasilan program. Menurut sejumlah ahli, pemberdayaan masyarakat didasarkan pada empat prinsip, yaitu:

a. Prinsip kesetaraan

Lembaga pelaksana program pemberdayaan masyarakat dan masyarakat diperlakukan sama. Prinsip-prinsip utama harus dipatuhi selama proses pemberdayaan. Dinamika yang tercipta adalah kesetaraan dengan membangun sarana untuk bertukar keahlian, pengalaman, dan pengetahuan satu sama lain. Setiap individu dapat memperbaiki kelemahannya dengan saling memberi dukungan dan motivasi, saling membantu, saling bertukar pengalaman, dan belajar satu sama lain. Setiap orang yang mengikuti kegiatan pemberdayaan mampu menghidupi dirinya dan keluarganya secara mandiri.

b. Prinsip partisipasi

Program pemberdayaan yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat dapat mendorong kemandirian masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat memerlukan waktu dan proses pendampingan. Pendamping yang sangat terampil dibutuhkan agar dapat menerima arahan yang tepat dari pendamping dan mendorongnya untuk memajukan diri sesuai dengan potensinya. Setiap masyarakat

dalam hal ini dapat mampu mencukupi keperluan anggota dan keluarganya sendiri.

c. Prinsip keswadayaan atau kemandirian

Setiap anggota masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan mampu mengembangkan potensi diri dan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Setiap anggota masyarakat juga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan menafkahi keluarganya tanpa bergantung pada orang lain. Mampu menyimpan pemahaman mendalam tentang kendala usahanya, termasuk lingkungan, tenaga kerja, kehendak, dan aturan sosial yang sejak dulu disyaratkan kepatuhan. Secara keseluruhan perlu ditemukan dan digunakan sebagai titik tolak bagi proses pemberdayaan.

d. Prinsip berkelanjutan

Program pemberdayaan harus memperhatikan peran pendamping daripada masyarakat secara keseluruhan agar berkelanjutan. Peran pendamping lambat laun tapi pasti semakin berkurang karena masyarakat mampu mengatur kegiatannya sendiri. Setiap peserta dalam kegiatan program pemberdayaan akan memperoleh manfaat dari pemahaman, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang akan diberikan oleh program tersebut. Akibatnya, setiap orang memiliki kesempatan untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang pada dasarnya membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka.²⁹

²⁹Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat "Wacana dan Praktik"*, 11-12.

4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat tujuh tahapan atau langkah pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Soekanto, yaitu:

a. Tahap persiapan

Terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap penyiapan petugas tenaga pemberdayaan oleh pekerja masyarakat dan tahap persiapan lapangan nondirektif (tidak langsung). Petugas tenaga pemberdayaan masyarakat perlu disiapkan untuk menyukseskan program pemberdayaan. Persiapan lapangan dilakukan melalui studi kelayakan terhadap lokasi yang akan dijadikan sasaran. Pendekatan juga dilakukan agar terjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat.

b. Tahap pengkajian “*assessment*”

Tahap pengkajian sangat penting untuk efektivitas program dan realisasi inisiatif pemberdayaan masyarakat. Prosesnya dapat dilakukan secara individu atau kelompok dalam masyarakat dan untuk memastikan bahwa program tersebut memenuhi kebutuhan dan potensi masyarakat. Petugas terlebih dahulu harus menentukan masalah kebutuhan yang dirasakan (*feeling needs*) dan sumber daya yang dimiliki. Masyarakat dalam hal ini dilibatkan secara aktif dan petugas hanya berfungsi sebagai fasilitasi dan membantu menyusun permasalahan yang disampaikan.

c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan

Tahap ini, petugas berfungsi sebagai agen pertukaran partisipatif dan berupaya mengajak masyarakat memikirkan masalah yang mereka temui

dan solusinya. Masyarakat diharapkan untuk mempertimbangkan sejumlah alternatif yang berbeda. Beberapa alternatif yang berbeda tersebut, mereka harus bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Alternatif tersebut nantinya bisa dipilih yang terbaik demi membantu tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat.

d. Tahap pemformalisasi rencana aksi

Selanjutnya, agen perubahan membantu setiap kelompok membuat rencana dan kegiatan untuk memecahkan masalah. Petugas juga membantu memformalkan ide-ide mereka melalui tulisan. Setiap kelompok dapat memahami akan sasaran dan tujuan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini sudah memiliki pandangan dan menuliskan tujuan jangka pendek yang akan dicapai.

e. Tahap implementasi program atau kegiatan

Petugas dan masyarakat saling berkolaborasi sehingga dapat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat sebagai kader dikembangkan untuk menjamin keberlanjutan program. Upaya untuk menghindari hambatan yang berarti dalam pelaksanaannya, program tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa semua peserta program memahami maksud, tujuan dan sasaran dengan tepat.

f. Tahap evaluasi

Warga dilibatkan dalam evaluasi, sehingga diharapkan dalam jangka waktu pendek akan menciptakan sistem pengawasan internal masyarakat,

sedangkan untuk jangka panjangnya dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan mengembangkan komunikasi agar masyarakat lebih mandiri. Tahap evaluasi ini diharapkan dapat mengetahui ukuran keberhasilan program yang jelas dan terukur. Periode berikutnya dengan begitu permasalahan dapat dipecahkan dan tantangan yang dihadapi dapat teratasi. Evaluasi berguna sebagai umpan balik bagi perbaikan kegiatan ke depan.

g. Tahap terminasi

Tahap terminasi merupakan akhir formal dari hubungan dengan masyarakat sasaran. Proyek kemungkinan besar akan segera berakhir. Masyarakat yang berdaya telah mampu menata dan mengubah keadaan menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya bagi dirinya dan keluarganya. Terminasi dilakukan jika dipastikan bahwa semua program berjalan dengan baik dan berkelanjutan.³⁰

5. Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting, hal ini karena masyarakat di setiap daerah atau bahkan negara mempunyai kesejahteraan yang tidak selalu sama. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi pada umumnya memiliki kemandirian internal untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak bergantung pada pihak lain. Berbeda dengan masyarakat yang kesejahteraannya rendah masih belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara penuh dan masih harus mencari bantuan orang

³⁰Ibid., 13-14.

lain. Bantuan pihak lain tersebut haruslah bersifat mendidik dan mentalitas agar anggota masyarakat dapat bekerja lebih efektif dan sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka sendiri di masa depan.³¹

D. Strategi dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Ada tiga strategi yang dapat dilakukan dalam upaya memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah, upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah kekuatan dan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan, yaitu:

1. Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dijalankan dapat membangun dan mengubah institusi atau struktur yang memungkinkan setiap orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan untuk menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
2. Pemberdayaan melalui tindakan sosial dan politik dilakukan dengan perjuangan dan gerakan politik digunakan untuk membentuk kekuatan.
3. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran dapat dicapai dalam berbagai cara selama proses pendidikan.³²

³¹Ibid., 15.

³²Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat "Wacana dan Praktik"* (Jakarta: Kencana, 2013), 28.